

## **ABSTRAK**

*Implementation of cash planning began to realize from the issuance of Act 1 of 2004 on State Treasury in the explanation of the law, explains that one of the treasury function is to carry out planning cash activities. This activity is required in order to manage the government's financial resources are limited, so the use of state finances can be performed efficiently and provide value-added. cash planning is an element of public sector cash management that require public sector organizations to make changes in planned expenditure financed from the state budget. These changes include the withdrawal of funds to make the unit of projected estimate of the amount of funds needed by the task force during a certain period and the estimated distribution of funds which is a compilation of the withdrawal unit estimate is a projection of some funds that will distributed by a task force within the work area so that the State Treasury Service Office Service Office of State Treasury as general treasurer of state power in the region to find the funding requirements within the scope of payment. Regulation of the Minister of Finance Decree. 192 of 2009 describes the principal component in the preparation of cash plans in the work unit level and the power of the state general treasurer as a tool in the management of the state treasury to know the state revenue and expenditure projections to minimize idle cash and improve liquidity and timeliness in meeting payment obligations.*

*This study aims to gain an understanding in the implementation of cash planning at unit level work and the power of the general treasurer of the state in ensuring a level of disbursement of the budget unit at the State Treasury Services Office of Malang. The approach used in this research is a qualitative approach. Source of data obtained through interviews and questionnaires to several government officials and from documents in the form of budget estimates and estimates of withdrawal disbursement of the budget task force and its realization as well as literature obtained from the State Treasury Services Office of Malang.*

*Formulation and implementation of the estimate budget withdrawal and the disbursement of budget estimates, it is a form of implementation of the plans of cash expenditure financed from the budget of the State in Malang State Treasury services is the implementation of the instruction of the Ministry of finance Decree. 192 In 2009, new progress in July 2010 and was followed the next year.*

*Keywords : Budget, Cash Planning, Estimate withdrawal ,Disbursement of budget estimate*

## ABSTRAK

Pelaksanaan perencanaan kas mulai disadari sejak dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam penjelasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah. Perencanaan kas merupakan elemen dari manajemen kas sektor publik yang mengharuskan organisasi sektor publik melakukan perubahan dalam merencanakan pengeluarannya yang dananya bersumber dari APBN. Perubahan tersebut antara lain adalah dibuatnya perkiraan penarikan dana satuan kerja yang merupakan proyeksi sejumlah dana yang dibutuhkan oleh satuan kerja selama periode tertentu dan perkiraan pencairan dana yang merupakan kompilasi dari perkiraan penarikan dana satuan kerja yang merupakan proyeksi sejumlah dana yang akan dicairkan oleh satuan kerja dalam lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah dapat mengetahui kebutuhan dana dalam lingkup wilayah pembayarannya. Peraturan Menteri Keuangan No. 192 tahun 2009 menjelaskan komponen pokok dalam penyusunan perencanaan kas di tingkat satuan kerja dan kuasa bendahara umum negara sebagai alat dalam manajemen kas negara mengetahui proyeksi penerimaan serta pengeluaran negara dalam rangka meminimalisasi kas yang menganggur dan meningkatkan likuiditas pembayaran dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dalam pengimplementasian perencanaan kas di tingkat satuan kerja dan kuasa bendahara umum negara dalam memastikan tingkat pencairan dana anggaran satuan kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada beberapa aparatur pemerintah dan dari dokumen-dokumen berupa perkiraan penarikan dana anggaran serta perkiraan pencairan dana anggaran satuan kerja dan realisasinya serta literatur-literatur yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Penyusunan dan pelaksanaan perkiraan penarikan dana Anggaran serta perkiraan pencairan dana Anggaran yang merupakan bentuk implementasi dari perencanaan kas dalam sisi pengeluaran yang dananya bersumber dari APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192 tahun 2009 baru terlaksana pada tahun 2010 di bulan Juli dan diikuti tahun berikutnya.

Kata kunci: Anggaran, Perencanaan Kas, Bendahara Umum Negara, Perkiraan Penarikan Dana, Perkiraan pencairan dana